

NASKAH PUBLIKASI  
KARYA DESAIN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NO 1  
TAHUN 2017 DALAM PERANCANGAN INTERIOR  
BANGUNAN PEMERINTAH**

(Studi pada Ruang Sidang Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Yogyakarta)



**Novi Budi Raharja**

**NIM 1510150123**

**PROGRAM STUDI S-1 DESAIN INTERIOR  
JURUSAN DESAIN FAKULTAS SENI RUPA  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NO 1 TAHUN 2017 DALAM PERANCANGAN INTERIOR BANGUNAN PEMERINTAH (Studi pada Ruang Sidang Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta)** diajukan oleh Novi Budi Raharja, NIM 1510150123, Program Studi S-1 Desain Interior, Jurusan Desain, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Mengetahui

**Pembimbing 1**



Martino Dwi Nugroho, S.Sn, MA.  
NIP 19770315 200212 1 005 / NIDN 0015037702

NASKAH PUBLIKASI KARYA DESAIN

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NO 1 TAHUN 2017 DALAM PERANCANGAN INTERIOR BANGUNAN PEMERINTAH**

**(Studi pada Ruang Sidang Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Yogyakarta)**

**NOVI BUDI RAHARJA**

Program Studi Desain Interior, Jurusan Desain, Fakultas Seni Rupa, ISI Yogyakarta  
Jl. Parangtritis km 6,5 Sewon Bantul Yogyakarta  
Email: novibudiraharja@gmail.com

## **ABSTRACT**

*The plenary session room of the Regional House of Representatives (DPRD) of the City of Yogyakarta is one of the important rooms in the building of parliament. The main function of the plenary session is used to determine decisions or laws by board members with the head of the district. Plenary session room Regional representative council is part of government buildings should have standards that are in accordance with government regulations. In addition, as part of the Yogyakarta Regional Government which enacts the Regional Regulation of DIY number 1 in 2017, which is about building architecture characterized by the Special Region of Yogyakarta, the plenary room should have the image of Yogyakarta's privilege. The purpose of the design of the plenary session room of the Regional Representative Council of the City of Yogyakarta is to optimize the activities of board members and staff through improving quality and facilities. In addition to paying attention to traditional Javanese images and themes and referring to government building standards, this design also pays attention to the circulation, color and shape of furniture that reflects honorable board members. This design uses traditional Javanese themes by taking the form of Javanese architecture and integrating it with an eclectic style so that it is in harmony with the image of the DPRD and the times.*

**Keywords:** interior, plenary session, DPRD, privileges, eclectic

## **ABSTRAK**

Ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta merupakan salah satu ruangan penting di dalam gedung anggota dewan perwakilan. Fungsi utama ruang sidang paripurna digunakan untuk menentukan keputusan atau undang-undang oleh anggota dewan bersama kepala daerah. Ruang sidang DPRD yang merupakan bangunan pemerintah seharusnya memiliki standar yang sesuai dengan aturan

pemerintah. Selain itu sebagai bagian Pemerintah Daerah Yogyakarta yang memberlakukan Perda DIY nomor 1 tahun 2017 yaitu tentang arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta, ruang sidang paripurna seharusnya memiliki citra keistimewaan Yogyakarta tersebut. Tujuan perancangan ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta ini untuk mengoptimalkan kegiatan anggota dewan dan staff melalui peningkatan kualitas dan fasilitas. Selain memperhatikan citra dan tema tradisional jawa dan mengacu pada standar bangunan pemerintah, perancangan ini juga memperhatikan sirkulasi, warna dan bentuk *furniture* yang mencerminkan anggota dewan yang terhormat.

**Kata kunci:** interior, sidang paripurna, DPRD, keistimewaan, eklektik

## I. PENDAHULUAN

Provinsi Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY atau UU Keistimewaan yang telah disahkan pada tahun 2012. Hal ini memberikan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dalam kaitan arsitektural, pemerintah daerah Yogyakarta memberlakukan Perda DIY nomor 1 tahun 2017 yaitu tentang arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2, diberlakukan pada bangunan milik perseorangan, kelompok orang, masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Daerah, atau badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi yaitu untuk membentuk peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah. Peraturan daerah atau keputusan ini merupakan hasil dari rapat paripurna. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

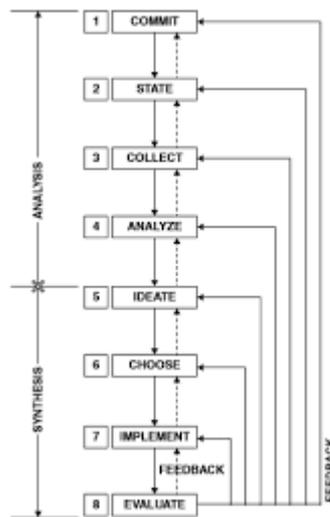
Oleh karena itu, ruang sidang paripurna DPRD merupakan salah satu ruangan penting di dalam gedung anggota dewan perwakilan. Ruang sidang paripurna menjadi icon dari gedung DPRD di berbagai daerah, termasuk di kota Yogyakarta. Selain citra daerah, ruang sidang paripurna seharusnya efektif, estetik dan fungsional dengan memperitimbangkan beberapa aspek.

Tujuan perancangan ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta ini untuk mengoptimalkan kegiatan anggota dewan dan staff melalui peningkatan kualitas dan fasilitas. Selain memperhatikan citra dan tema tradisional jawa dan mengacu pada standar bangunan pemerintah, perancangan ini juga memperhatikan sirkulasi, warna dan bentuk *furniture* yang mencerminkan anggota dewan yang terhormat.

## II. METODE PERANCANGAN

Pemilihan metode desain yang digunakan bersumber dari buku panduan metode desain menurut Rosemary & Otie Kilmer

## 1. Proses Desain



Gambar 1. . Diagram Proses Desain.  
( Sumber : Kilmer & Kilmer, 2014, hal 178)

## 2. Metode Desain

Berdasarkan proses desain diatas, penulis membagi proses tersebut menjadi 3 tahapan metode desain.

### a. Metode Pengumpulan Data & Penelusuran Masalah

#### 1) *Commit (Accept the Problem)*

Pada tahap awal proses desain ini, sebagai desainer adalah menerima “masalah” yang ada dengan melakukan *prioritization* (dengan membuat time schedule, priority list) dan *Personal Value Analogies* (menyelesaikan permasalahan dengan cara yang unik dan kreatif dan bernilai)

#### 2) *State (Define the Problem)*

Dalam tahap ini permasalahan dipengaruhi oleh gedung DPRD Kota Yogyakarta merupakan bangunan milik pemerintah dan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa yang memiliki undang-undang keistimewaan (UUK)

#### 3) *Collect (Gather the Facts)*

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi adalah dengan *interviews* pengguna ruang (Kepala dan kepala bagian kerumahtanggan DPRD Kota Yogyakarta) dan mencari referensi dari proyek yang serupa (data tentang ruang sidang parlemen di dalam maupun luar negeri)

#### 4) *Analyze*

Data dan informasi harus disaring, hanya yang berpengaruh terhadap solusi akhir dan berkaitan dengan permasalahan (*conceptual sketches, matrix* dan *categorization*)

### b. Metode Pencarian Ide & Pengembangan Desain

#### 1) *Ideate*

Proses pencarian ide memiliki 2 tahap yaitu *drawing phase* (mencakup gambar diagram, plan, sketch yang menunjang kebutuhan

dan fungsi ruang) dan *concept statement* (tahap dimana inspirasi dan ide dituangkan dalam kalimat).

2) *Choose (Select the Best Option)*

Dalam tahap ini desainer memilih pilihan terbaik dilihat dari konsep yang cocok dengan budget, kebutuhan, hal objektif, dan sesuai dengan perancangan ide awal (sesuai dengan standar bangunan pemerintah dan UUK Yogyakarta). Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memilih dan menetapkan alternatif terbaik adalah *personal judgement* dan *comparative analysis*

3) *Implement (Take Action)*

Tahap dimana ide yang terpilih dituangkan dalam bentuk fisik seperti *final design drawings, budgets, construction drawing* dan presentasi

c. Metode Evaluasi Pemilihan Desain

1) *Evaluate*

Proses review dan membuat penilaian kritis dari apa yang sudah dicapai apakah sudah berhasil memecahkan permasalahan. Melihat apa yang dipelajari/didapat dari pengalaman dan apa pengaruh/hasil desain. Sebagai pedoman desainer untuk menyelesaikan masalah-masalah selanjutnya yang akan dihadapi.

2) *Feedback*

Merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan evaluasi pada setiap tahap desain. Langkah untuk membandingkan antara hasil desain dengan proses pengerjaan proyek di lapangan

### III. HASIL

#### 1. Data lapangan



Gambar 2. Fasad Bangunan DPRD Kota Yogyakarta dan Pintu Depan Ruang Sidang Paripurna (Sumber: Novi Budi Raharja, 2018)



Gambar 3. Interior Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2018)



Gambar 4. Interior Balkon dan Ruang Kontrol  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2018)

## 2. Permasalahan Desain

Berdasarkan dari data-data yang sudah di dapatkan baik dari lapangan, data literatur, dan informasi dari klien dan staff DPRD Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan lingkup permasalahan pada perancangan Interior Gedung DPRD Kota Yogyakarta, meliputi :

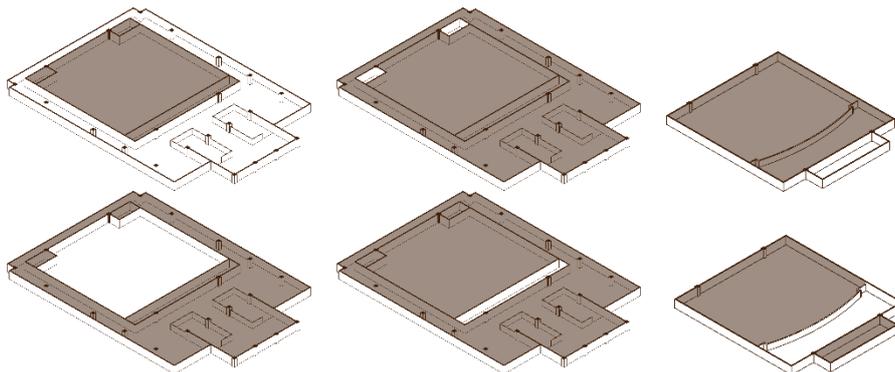
- a. Bagaimanakah merancang ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sesuai dengan standar bangunan pemerintah dan menerapkan Peraturan Daerah DIY No 1 Tahun 2017?
- b. Bagaimana merancang ruang sidang paripurna yang dapat memenuhi fasilitas, kapasitas, kebutuhan aktivitas pengguna sesuai dengan ergonomi ruang baik pencahayaan, penghawaan, tata suara dan visual serta furniture?

## IV. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Desain

Konsep perancangan pada gedung DPRD Kota Yogyakarta ini yaitu menjadikan interior gedung mempunyai citra tradisional jawa dengan menampilkan kesan modernitas. Konsep perancangan yang diambil adalah joglo. Susunan ruangan pada rumah bentuk joglo yang banyak dimiliki oleh masyarakat biasa dibagi juga menjadi tiga bagian, yaitu ruangan pertemuan yang disebut pendapa, ruang tengah atau ruang untuk pentas wayang (ringgit) yang disebut

pringgitan, dan ruang belakang yang disebut dalem atau omah jero sebagai ruang keluarga. Di desain ruang sidang DPRD ini menerapkan makna ruang pertemuan (pendapa) dan ruang tengah (pringgitan). Pendapa ini berfungsi sosial, maka ruang ini mempunyai sifat terbuka (*public space*), sifat tersebut juga mencerminkan *lobby* DPRD yang terbuka dengan masyarakat. Sedangkan pringgitan mempunyai sifat terbuka tetapi lebih terbatas. Sifat tersebut diterapkan dalam ruang sidang paripurna.



Gambar 5. Pembagian Area Sesuai Konsep Joglo  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)

Tema Pendukung dalam perancangan ini adalah “Sakaning Purbonegoro”. Tema ini memiliki arti penyangga yang memelihara negara. Hal ini merupakan harapan terhadap tugas DPRD itu sendiri. DPRD merupakan salah satu dari pilar negara (legislatif). Negara akan berjalan dengan baik bila pilar-pilar negara (legislatif, yudikatif dan eksekutif) dipelihara dengan baik.



Gambar 6. Saka Guru dan Batik Purbonegoro  
(Sumber : Google Search diakses 20 Januari 2020)

Desain ini menerapkan gaya eklektik, gaya ini tepat karena mengkombinasikan gaya tradisional sebagai citra Yogyakarta dan gaya modern dengan konsep pemikiran Robert Venturi terhadap Gaya Eklektik yaitu *Hybrid/pure, distorted/straightforward, ambiguous/articulated* dan mengambil nilai yang dikenal (lokalisme). Dengan prinsip perancangan *adoption & modification* (elemen

historis) dan *Asymmetrical-Symmetry*. Hal ini untuk mencitrakan DPRD sebagai dewan terhormat yang mengikuti jaman dan terbuka/transparansi dan mengangkat budaya lokal.

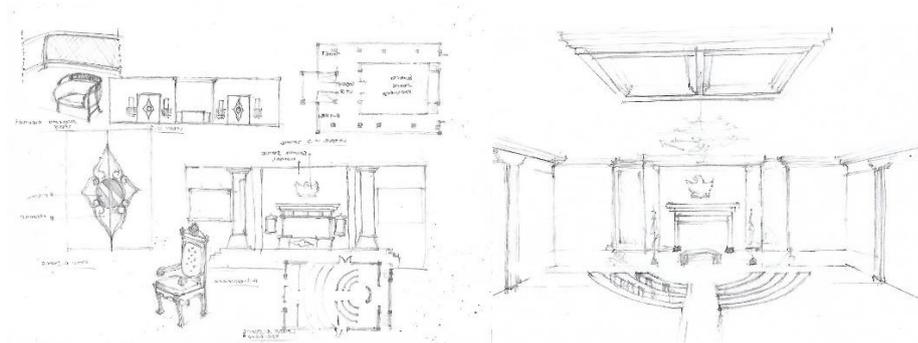
Secara garis besar dapat disimpulkan solusi desain terhadap permasalahan

<b>Pernyataan Masalah</b>	<b>Ide Solusi</b>
Merancang ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sesuai dengan standar bangunan pemerintah dan menerapkan Peraturan Daerah DIY No 1 Tahun 2017	Menggunakan gaya ekletik dengan kombinasi gaya tradisional dan gaya modern. Mengambil konsep bangunan tradisional Joglo dan mengangkat tema 'Sakaning Purbonegoro'
Fasilitas ruangan	Menggunakan teknologi terbaru, seperti penggunaan <i>sound system</i> dan videotron untuk layar. Pengontrolan sistem yang terpadu
Layout ruangan	Bentuk ruang ( <i>room shape</i> ) mempertimbangkan tempat duduk, volume ruang, sirkulasi, arah pandang, sirkulasi, estetika dan efektifitas fungsi ruang sidang
Peangaturan tempat duduk	Pengaturan tempat duduk baik untuk anggota sidang DPRD maupun tempat duduk di balkon untuk masyarakat dan wartawan sehingga memiliki volume per seat dan jarak pandang audio visual yang sesuai dengan ergonomi
Furniture	Penggunaan furniture custom yang sesuai dengan kehormatan anggota dewan dengan menggunakan aspek ergonomic. Meja yang dibuat dengan tablet PC layar sentuh dan <i>microphone</i>
Pencahayaan ruangan	Penggunaan fenilasi kaca sebagai estetika dan pencahayaan alami. Penghitungan penggunaan lampu.
Penghawaan ruangan	Menganti penggunaan AC split dengan penggunaan AC VRF sehingga lebih efisien dan efektif

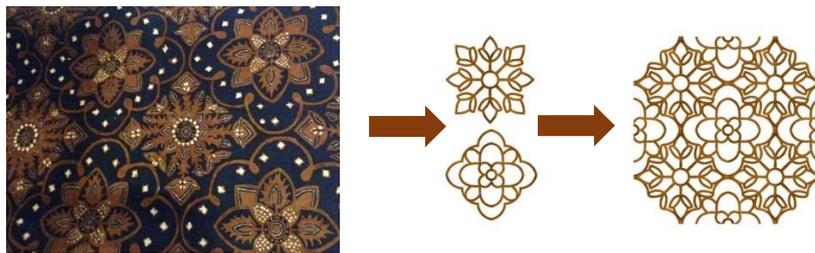
Pada tahapan ideasi awal, menunakan *mood board* dan sketsa desain, dimana dengan adanya *mood board* konten suasana ruang, elemen dekoratif, komposisi warna, bentuk, material dapat terjalin dengan terkoneksi menjadi sebuah gambaran desain.



Gambar 7. Alternatif Moodboard  
( Sumber: Google Search dan Novi Budi Raharja, 2020)



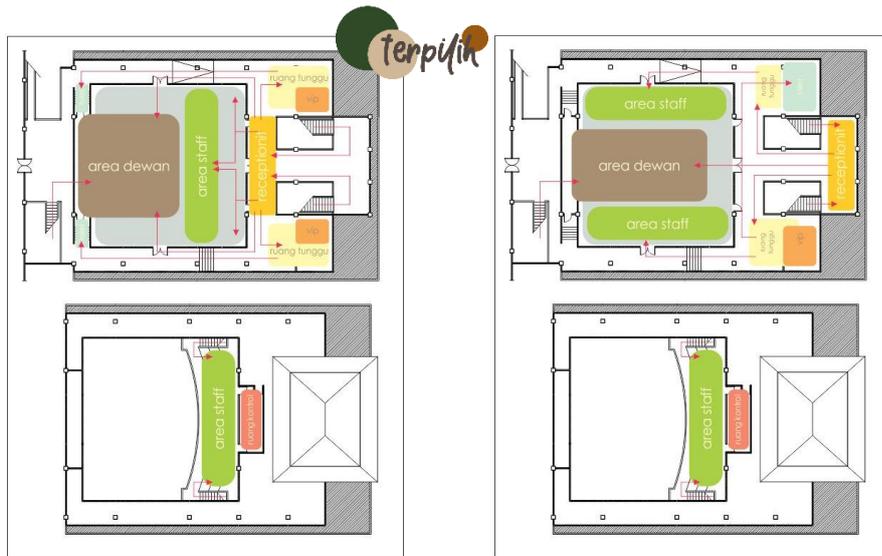
Gambar 8. Sketsa Desain  
Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



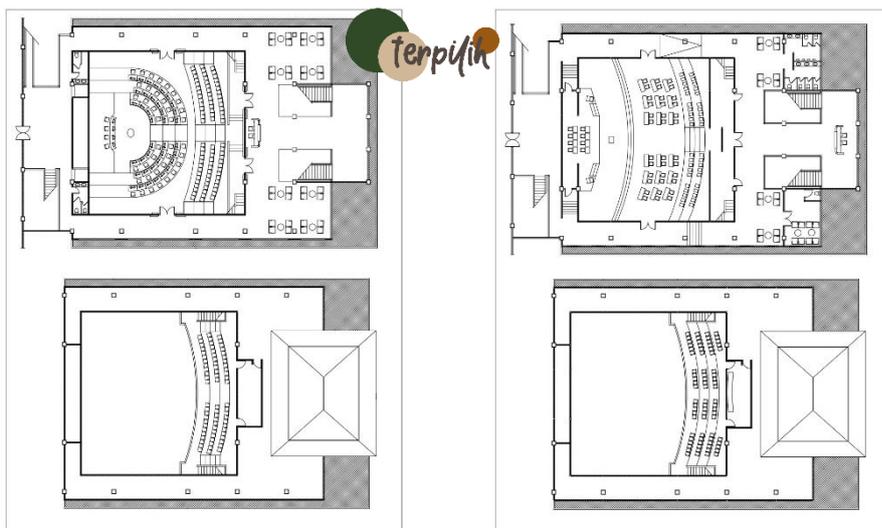
Gambar 9. Tranformasi dan Repetisi Tema  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



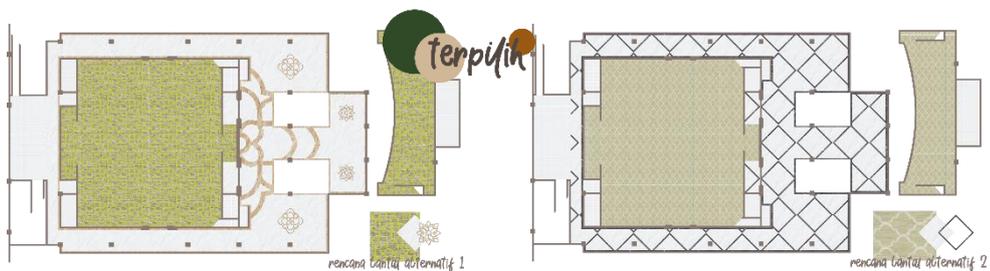
Gambar 10. Diagram Matrix dan Diagram Bubble  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



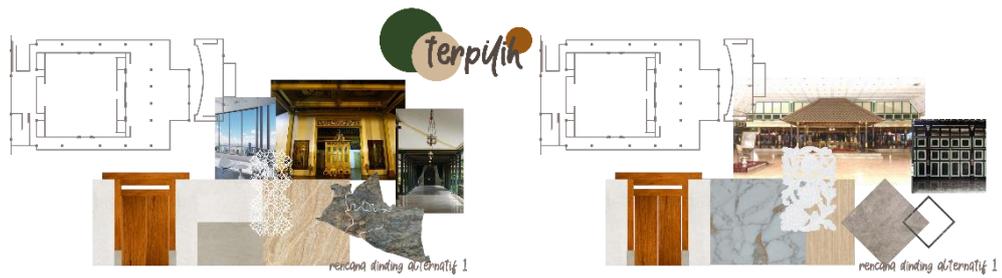
Gambar 11. Alternatif Zoning Dan Sirkulasi  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



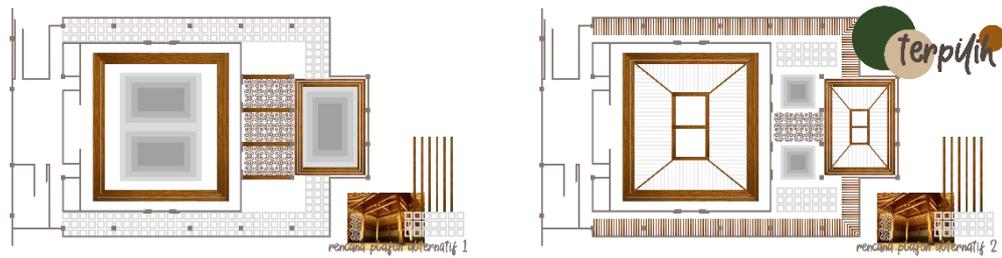
Gambar 12. Alternatif Layout  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



Gambar 13. Analisis Alternatif Rencana Lantai  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



Gambar 14. Analisis Alternatif Dinding  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



Gambar 15. Analisis Alternatif Plafon  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



Gambar 16. Analisis Alternatif Furniture  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)

## 2. Desain Akhir



Gambar 17. 3D Modeling Fasad dan Prefunction Hall  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



Gambar 18. 3D Modeling Informasi Area dan Waiting Lounge  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



Gambar 19. 3D Modeling Ruang Sidang Paripurna dan Podium  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



Gambar 20. 3D Modeling Area Anggota Sidang dan Staff  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)



Gambar 21. 3D Modeling Controlroom dan Toilet  
(Sumber: Novi Budi Raharja, 2020)

## V. KESIMPULAN

Desain interior pada ruang sidang paripurna perlu mempertimbangkan aspek efektif, estetis dan fungsional. Ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta selain mempertimbangkan standar pemerintah juga menerapkan Perda DIY nomor

1 tahun 2017 tentang arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu dipilihlah desain interior dengan tema tradisional Jawa dan modern dengan gaya eklektik. Tema ini diambil bertujuan untuk memberikan citra keistimewaan Yogyakarta dan citra anggota dewan terhormat. Gaya eklektik diambil karena memiliki karakter yang mengangkat nilai lokalisme dengan paduan unsur modern.

Menjawab permasalahan yang ada, maka perancang melakukan beberapa langkah untuk memecahkan permasalahan citra tanpa mengesampingkan fungsinya. Pertama dengan membagi area ruangan dengan mengimplementasikan bangunan joglo yang merupakan bangunan khas Jawa. Bagian *lobby* bersifat terbuka untuk umum menerapkan filosofi pendapa yang juga memiliki sifat terbuka (*publik space*). *Lobby Area* didesain lebih terbuka maka dibuatlah area *lobby* yang terbuka dengan bukaan jendela yang banyak dan lebar, bukaan jendela ini mempresentasikan pendopo. Di bagian ruang sidang paripurna menerapkan filosofi ndalem yang bersifat terbuka tapi lebih terbatas, sehingga terdapat pemisah zona dan sirkulasi bagi anggota dewan dan masyarakat umum maupun wartawan yang ingin mengikuti sidang dengan unsur pringgitan. Penambahan area transisi ini juga berguna sebagai tambahan penopang bentangan balkon yang panjang sehingga dapat menopang beban di atasnya.

Kedua, perancang mendesain layout pada ruang sidang dengan mengubah shape roome, yang semula sejajar dibuat menjadi setengah lingkaran dengan titik orientasi yang sama ke area pengendali rapat (ketua). Perbaikan teknis pada trap tempat duduk yang semula datar pada area ruang sidang paripurna dibuat tingkatan untuk memberikan jarak pandang yang leluasa ke arah meja pimpinan.

Ketiga, perancang memperbaiki dan mengubah fasilitas *furniture* dan *equipment*, yang sesuai dengan ergonomis dan fungsinya tanpa merubah citra. Menggunakan kursi rotan pada ruang tunggu sangat memudahkan pengguna untuk citra tradisional dan memberikan kemudahan pengguna untuk fleksibilitas dan perpindahan pengguna. Sedangkan meja resepsionis berada dekat dengan pintu masuk dan dekat dengan ruang sidang membuat efektif dan efisien. Pada bagian ruang sidang, kursi dan meja anggota sidang yang dibuat *costume* menjadikan desain lebih efektif dan efisien dan memudahkan pengguna dengan menambahkan fasilitas modern seperti tablet dan *microphone lifter* pada meja setiap anggota sidang tanpa mengesampingkan citra tradisional Jawa dan kehormatan anggota dewan. Pada bagian staff penggunaan meja dikurangi karena dirasa tidak terpakai, sehingga diganti dengan penambahan kursi yang bias dipakai sebagai kursi tamu undangan. Di balkon, penggunaan kursi auditorium juga digunakan sebagai penunjang yang dirasa sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kilmer, R., & Kilmer, O. (2014). *Designing Interiors*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- D. K. Ching, F. (1996). *Architecture; Form, Space, And Order*. Jakarta: Erlangga
- Harisah, A., Sastrosasmito, S., & Hatmoko, A. U. (2007). *Eklektisisme dan Arsitektur Ekletik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dakung, S. (1998). *Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendiidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.